PENGADAAN-BARANG-JASA

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 13 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 13

KABUPATEN SUKOHARJO: 29 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur bahwa tata cara Pengadaan yang merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa dan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;

- Dengan berlakunya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa terdapat beberapa perubahan pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di desa maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Permen Dalam Negeri No. 4 Tahun 2016; Permen Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018; Permen Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa pemerintah No. 12 Tahun 2019; Perda Kab

Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; Perbup Sukoharjo No. 45 Tahun 2018; Perbup Sukoharjo No. 9 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Maksud dan tujuan;
  2. Tata nilai pengadaan;
  3. Ruang lingkup pengadaan;
  4. Para pihak;
  5. Perencanaan pengadaan;
  6. Persiapan pengadaan;
  7. Pelaksanaan pengadaan;
  8. Pembayaran hasil pengadaan;
  9. Keasaan kahar;
  10. Pemutusan perjanjian;
  11. Larangan;
  12. Sanksi;
  13. Penyelesaian perselisihan;
  14. Pelaporan dan serah terima;
  15. Pembinaan dan pengawasan;
  16. Pengadaan secara elektronik;
  17. Ketentuan lain-lain; dan
  18. Ketentuan penutup.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 18 Maret 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 Maret 2020